

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan selama ini bersifat *top-down* dibandingkan *bottom-up* sehingga telah menjadikan masyarakat desa hanya sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah setiap daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Selain itu di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan aktualisasi diri melalui berbagai aktivitas.

Dari penjabaran diatas peneliti melihat masih adanya pembangunan tingkat desa yang masih top down atau perencanaan terletak pada penguasa tertinggi ada

pada pemerintahan sebagai pemberi arahan tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat dan juga masyarakat hanya dijadikan objek dari pembangunan. Padahal di undang-undang no 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah bahkan ditingkat desa diberi kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, dengan adanya undang-undang ini serta didukung dengan undang-undang desa yang menyatakan bahwa dalam pembangunan desa perlu adanya pemberdayaan terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat baik pembangunan fisik atau pembangunan non fisik.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar, pemberdayaan masyarakat desa akan mempengaruhi pembangunan desa. Menurut Ali Hanapiah Muhni, pembangunan desa meliputi dua aspek yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan pembangunan desa dalam aspek pemberdayaan insani atau yang dikenal dengan pemberdayaan masyarakat.¹

Pembangunan fisik atau yang biasa dikenal dengan pembangunan infrastruktur merupakan perwujudan cita-cita negara untuk menggapai masyarakat yang makmur dan sejahtera merata di seluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belumlah diperoleh masyarakat jika disebabkan masih adanya sifat

¹ Muhi, Ali Hanapiah. (2011) Fenomena Pembangunan Desa. Diakses melalui <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf>. Diakses pada 23 Januari 2022 pukul 09.30 WIB.

apatis terhadap pembangunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang banyak arti, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan, tetapi juga mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi.

Pembangunan infrastruktur melalui pendekatan partisipatif meliputi tahap perencanaan sampai tahap pemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Menurut Putman menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, termasuk dalam membangun infrastruktur pedesaan, adalah situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama.²

Nagari Taram adalah Nagari yang terletak pada Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Yang terdiri dari tujuh jorong yaitu ; Jorong Subarang, Jorong Balai Cubadak, Tanjuang Kubang, Parak Baru, Jorong Tanjuang Ateh, Jorong Siparai, Jorong Gantiang. Nagari yang memiliki luas 6059 hektar yang hampir 2/3 luasnya adalah hutan.

² Putman,R.D.,Keonardi,R. And Nanetti,R.Y.1993. Making Democracy Work: Civil Traditional in Modern Italy. Princeton,NJ : Princeton University Press hal 193

Nagari Taram adalah salah satu nagari swasembada yang mampu memberdayakan masyarakat dan tingkat partisipasinya yang tinggi sehingga mendapatkan penghargaan empat kali berturut-turut sebagai nagari terbaik sekabupaten bahkan tingkat provinsi dan salah satu yang menarik yaitu adanya inovasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa yaitu swadaya tukang nagari(Swa-Tuna). Dengan adanya inovasi swa-tuna hal ini tentu menjadi alasan peneliti ingin meneliti bagaimana tahap partisipasi masyarakat nagari taram melalui inovasi ini. Berikut ada beberapa penghargaan atau kejuaraan yang dimenangkan oleh nagari taram hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.1
Prestasi Nagari Taram

No	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kabupaten	Tingkat Provinsi
1	Juara 1 Lomba Nagari 2018	Juara 1 lomba nagari 2018	Juara 1 lomba nagari 2019
2	Juara 1 lomba nagari 2019	Juara 1 lomba nagari 2019	Juara 1 lomba hatinya pkk
3	Juara 1 lomba dasawisma 2018	Juara 1 lomba dasawisma 2018	Juara 1 lomba pilar-pilar sosial
4	Juara 1 lomba gerak PKK “kategori hatinya PKK”	Juara 1 lomba kader yandu 2018	Penghargaan dari kepala BPJS sebagai nagari pelopor

			SWAJKN-menuju UHJ 2019
5	Juara 1 lomba kader yandu	Juara 1 pilar-pilar sosial berprestasi kategori PSM	Ps – aroma taram- peserta liga 3 Asprov PSSI Sumbar
6	Juara 1 pilar pilar sosial berprestasi kategori PSM.	Taram- juara liga desa cabang sepak bola tingkat kabupaten lima puluh kota.	

Sumber : *Buku Profil Nagari Taram, 2020.*

Pada tabel 1.1 dapat dilihat dari tahun 2018 Nagari Taram sudah mengikuti Lomba Nagari Terbaik dan mampu mempertahankan hingga tahun 2019 sampai tingkat provinsi. Selain itu Nagari Taram juga mendapatkan prestasi di kegiatan masyarakat lainnya seperti Lomba Gerak PKK, Posyandu, dan sebagai Nagari Pelopor SWAJKN menuju UHC (*Universal Health Coverage*) 2019. Selain itu Nagari Taram juga mendapatkan prestasi di bidang PSM (Pilar-Pilar Sosial Masyarakat). Nagari Taram merupakan nagari berprestasi tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Nagari Taram juga memperoleh prestasi sebagai Nagari Terbaik 1 Regional 1 di tingkat Nasional. Terdapat 16 keunggulan Nagari Taram yang ditonjolkan dalam perlombaan tersebut. Namun, kunci keberhasilan Nagari Taram adalah tingginya rasa memiliki dan kerjasama di antara masyarakat.³

³ Taram-limapuluhkotakab.id, “Nagari Taram Rewind Tahun 2019”, <https://taramlimapuluhkotakab.desa.id/artikel/2019/12/31/nagari-taram-rewind-tahun-2019>, Diakses pada 22 agustus 2021

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Nagari Taram masyarakat juga ikut berpartisipasi, hal ini dengan ditandai adanya sumbangan berupa tenaga, pendanaan, dan partisipasi masyarakat lainnya. Wali Nagari berperan membangun kesadaran masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat maupun melalui program-program yang akan dilakukan. Masyarakat juga sangat berperan penting dalam kesuksesan pembangunan yang ada di desanya. Suatu kondisi hubungan yang baik antara pemerintah desa khususnya wali nagari dengan masyarakat sehingga akan mempengaruhi pembangunan nagari taram dan menjadi ini salah satu faktor nagari taram mendapatkan prestasi

Dalam bidang pemerintahan Nagari Taram merupakan Nagari Swasembada, berdasarkan Prodeskel Tahun 2018. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada yaitu:

1. Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan.
2. Tingkat kepadatan penduduk tergolong tinggi.
3. Tidak terikat dengan adat istiadat.
4. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain.
5. Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan untuk mendukung suatu program dengan cara yang beragam. Melalui pendekatan partisipatif peran keikutsertaan masyarakat tidak hanya sebatas dalam keikutsertaan secara fisik,

tetapi keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan pikiran dan pemecahan masalah. Hal ini bermaksud bahwa masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan melakukan analisis terhadap masalah yang ada. Landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Pada pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Peran aktif masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, partisipasi yang dilakukan masyarakat dimulai dari tahap partisipasi pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi.⁴

Pada partisipasi pengambilan keputusan pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang diambil keputusannya menyangkut kepentingan bersama, yang dapat dilihat pada kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap tawaran program yang ditawarkan. Pada program swa-tuna tahapan ini akan dihadiri oleh seluruh komponen swa-tuna yang

⁴ Josef, Riwo Kaho, M.PA. (2007). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hal 127

ada pada struktur beserta perangkat nagari untuk pembahasan rancangan program pembangunan yang mana pada program itu akan dilibatkan para anggota swa-tuna. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, ada beberapa indikator yang pertama keputusan awal; ini menjelaskan tentang pemahaman terhadap program pembangunan dan pembangunan apa saja yang akan melibatkan para anggota swa-tuna. Kemudian pada keputusan berlanjut merujuk pada kehadiran pada rapat untuk seluruh komponen yang terlibat memberikan dimana anggota swa-tuna memberi tanggapan, masukan, ide dan saran untuk keberlangsungan program swa-tuna. Yang terakhir keputusan operasional dimana pada tahap ini lanjutan tahapan sebelumnya dengan membuat rancangan atau komposisi keanggotaan untuk suatu program pembangunan dan bagaimana tahapan-tahapan kedepannya lalu pemilihan koordinator beserta anggota yang akan melaksanakan program pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan merupakan lanjutan dari rencana yang telah di sepakati sebelumnya. Pada partisipasi dalam pelaksanaan ada dua indikator yang pertama kontribusi sumber daya yang dimana ini merupakan upaya-upaya penyediaan yang dibutuhkan untuk kelancaran berjalannya suatu program pemabangunan. Penyediaan dari kebutuhan program swa-tuna berupa tenaga, ide, tanggapan, pendapat dan saran dari seluruh anggota swa-tuna. Selanjutnya upaya koordinasi adalah bagaimana pembagian anggota untuk melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan dan dibentuk pada tahap pengambilan keputusan. Dan bagaimana upaya-upaya dari anggota swa-tuna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan pembagian tugas pada anggota swa-tuna pada program pembangunan fisik dinagari taram. Pembangunan dinagari taram ada dua jenis yaitu

pembangunan tingkat nagari yang dimana bangunan tersebut digunakan seluruh masyarakat taram misalnya kantor wali nagari taram, kantor kerapatan adat nagari dan lain sebagainya. Anggota untuk pembangunan nagari seluruh anggota yang termasuk dalam swa-tuna dan bergiliran untuk berswadaya satu hari kerja. Yang kedua pembangunan tingkat jorong, dimana pembangunan ini anggota yang digilir untuk berswadaya hanya pada jorong yang terlibat pada pembangunan, misalnya pembangunan irigasi di jorong tanjuang kubang yang mana hanya tukang pada jorong ini saja yang berswadaya.

Dan pada tahap pengambilan manfaat yaitu kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dimana aspek penerimaan manfaat ada tiga jenis yang pertama aspek manfaat dari program pembangunan yaitu penambahan suatu bangunan fisik atau peningkatan kualitas pembangunan, sejauh ini sudah banyak peningkatan bangunan yang telah dilakukan ataupun penambahan bangunan baru yang mana disaat proses pembangunan dilibatkan swa-tuna didalamnya. Manfaat selanjutnya yaitu manfaat sosial dari hasil pembangunan. Manfaat sosial langsung dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bidang diantaranya bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang transportasi, bidang pertanian dan perkebunan dan lain-lain. Lalu manfaat pribadi bagi komponen swa-tuna yaitu secara tidak langsung mereka yang terlibat dalam pembangunan mendapatkan lapangan pekerjaan, karna mereka hanya diwajibkan 1 hari kerja untuk berswadaya pada satu program pembangunan, komponen swa-tuna juga dibebaskan dari gotong royong, ronda malam dan iuran iuran sosial. Yang paling genting mereka mempunyai rasa kekeluargaan pada lembaga ini, karna mereka

biasanya meringankan beban jika ada yang sakit atau kemalangan. Sekiranya diantara komponen swa-tuna yang sakit mereka yang termasuk pada komponen swa-tuna ini akan memberikan iuran dengan cara *gelas putar* istilah dari mereka. Mereka akan menyumbang baik berupa uang atau berupa hal lainnya yang tujuannya untuk anggota yang ada kemalangan.

Dan yang terakhir pada tahap evaluasi berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh yang telah dilaksanakan, apakah ada penyimpangan atau telah sesuai dengan rencana awal. Tahap evaluasi terbagi dua yaitu yang pertama evaluasi prefentif yaitu pengawasan terhadap program pembangunan. Pelaksanaan pengawasan program yang berjalan dilakukan oleh pemerintah nagari yaitu tim pelaksana dan pengawas kegiatan disingkat dengan TPK. Tim tpk dibentuk oleh pemerintah nagari untuk suatu program pembangunan dimana tugas mereka itu menyelesaikan kendala pada saat proses pembangunan. Misalkan ada tukang yang berswadaya berhalangan hadir tim tpk langsung mencari pengganti dengan tukang yang berswadaya pada saat itu. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi represif, dimana evaluasi ini dilakukan secara berkala setelah selesainya program pembangunan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala untuk bahan pertimbangan pada program selanjutnya.

Nagari Taram memiliki suatu inovasi didalam kerangka partisipasi masyarakat yang menggunakan jasa tenaga dari masyarakat nagari dalam pembangunan infrastruktur yang bermuara kepada pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam bentuk jasa. Program ini disebut dengan Swa-Tuna (Swadaya

Tukang Nagari), program ini merupakan inovasi dalam meningkatkan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan nagari terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan juga jika terjadi bencana alam. Inovasi ini merupakan kegiatan Pembangunan Persatuan Tukang Nagari Taram sesuai dengan SK Wali Nagari Taram Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengurus Tukang Nagari 2018-2023. Sebagaimana hasil wawancara bersama sekretaris Nagari Taram Swa-Tuna ini sebenarnya sudah ada sejak dahulunya tapi tidak menjadi program atau sebuah inovasi dari pemerintah nagari hanya bersifat sukarela saja atau hanya gotong royong rutin, pada masa penjabatan wali nagari bapak Defrianto Ifkar dibuatkan aturan serta SK dan juga bagaimana kewajiban dan hak yang akan didapatkan oleh masyarakat melalui program Swa-tuna ini. Masyarakat yang ikut dalam program ini mereka akan dipekerjakan dalam hal pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa dan nantinya jika mereka bekerja selama 1 minggu untuk 6 harinya kita bayar dengan upah dan 1 hari dihitung sukarela. Lalu bagi masyarakat yang tergabung dalam Swa-Tuna ini dibebaskan dari kegiatan ronda dan juga gotong royong. Program Swa-Tuna ini sudah ada sejak dulunya tapi hanya bersifat sukarela tanpa ada aturan dan mekanisme yang jelas bagi masyarakat dalam berpartisipasi atau di istilahkan dengan gotong royong. Gotong royong memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, antara lain:

1. Pekerjaan terselesaikan dengan cepat: Dengan gotong royong, banyak orang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu proyek pembangunan. Hal ini

dapat membuat pekerjaan yang seharusnya memakan waktu lama menjadi lebih cepat terselesaikan karena adanya bantuan dari banyak pihak.

2. Terjalannya persaudaraan dan kebersamaan: Melalui gotong royong, hubungan antarwarga akan semakin erat. Proses bekerja bersama untuk kepentingan bersama membantu membangun rasa solidaritas dan persatuan di antara anggota masyarakat.
3. Meningkatkan keamanan lingkungan: Gotong royong juga dapat membantu menjaga keamanan lingkungan. Misalnya, membersihkan lingkungan dari sampah atau merawat fasilitas umum dapat mengurangi risiko kecelakaan atau kejadian negatif lainnya yang dapat terjadi karena kondisi lingkungan yang buruk.
4. Menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat: Ketika masyarakat bekerja sama dalam gotong royong, hal ini menciptakan suasana sosial yang harmonis dan saling mendukung. Masyarakat yang merasa terlibat dalam kegiatan gotong royong cenderung lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan keseluruhan masyarakat. Dengan demikian, gotong royong bukan hanya membawa manfaat praktis seperti penyelesaian pekerjaan yang efisien dan pemeliharaan lingkungan yang baik, tetapi juga menguatkan nilai-nilai sosial dan kebersamaan di antara warga masyarakat

Karena melihat banyaknya manfaat dari gotong royong wali nagari taram berinovasi kegiatan gotong royong ini menjadi suatu lembaga khususnya untuk masyarakat yang berprofesi sebagai tukang. Program Swa-Tuna ini juga telah

diterbitkan Surat Keputusan yang mana ditetapkan mengenai pengurus Tukang Nagari Taram 2018-2023. Berikut struktur Tukang Nagari Taram dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1 Struktur Swa-Tuna



Sumber : SK Wali Nagari Taram Tahun 2018.

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat dalam Program Swa-Tuna ini sudah di legal formalkan oleh Wali Nagari dalam bentuk SK Struktur Tukang Nagari Taram dengan anggotanya terdiri dari setiap jorong yang ada ikut terlibat sebagai tukang nagari . Masyarakat menyumbangkan tenaga mereka untuk bekerja selama 1 hari dalam seminggu tanpa dibayarkan jasanya dan jika ada pembangunan berbasis nagari maka masing-masing tukang menyumbangkan tenaganya 1 hari dalam 1 minggu. Jumlah tukang nagari 104 orang, semua tukang di bebaskan dari kewajiban ronda malam dan gotong royong. Selain itu dengan adanya program ini ternyata juga mendorong masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dalam hal lainnya.

Program Swa-Tuna (Swadaya Tukang Nagari) ini pertama kali dikumpulkan oleh wali nagari taram karena melihat banyaknya potensi tukang di Nagari Taram, sehingga di berdayakan melalui pembentukan persatuan tukang nagari dan juga dilegalkan melalui SK Wali Nagari Taram. Untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur nagari dilakukan secara bertahap setiap jorong memiliki jadwal masing-masing pembangunan. Yang menjadi anggota dalam struktur Swa-Tuna ini adalah seluruh masyarakat setiap jorongnya yang memiliki profesi sebagai tukang. Inovasi ini diprakasai oleh Wali Nagari Taram melalui pertimbangan potensi masyarakat serta dilakukan diskusi dan penerbitan SK bersama Badan Musyawarah Nagari Taram.

Program ini sudah ada sejak tahun 2018 dengan pembangunan yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 1.2.



Tabel 1.2

Pembangunan Infrastruktur Melalui Program Swa-Tuna

NO	URAIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	JUMLAH BIAYA PEMBANGUNAN	TAHUN
1	Pavin Blok Jalan Surau Pitopang Lareh Aie	102.445.000,-	2018

2	Irigasi Piobang Bawah Jorong Tanjung Kubang	120.000.000,-	2018
3	Jalan Usaha Tani Gobah Somak Limau –muaro Balai Cubadak	123.650.000,-	2018
4	Jalan Usaha Tani Simpang Rambai – Polindes Jrg.Sipatai	230.000.000,-	2018
5	Irigasi Bandar Bulakan Jorong Ganting	100.000.000,-	2018
6	Pembangunan Gazebo KAN	50.000.000,-	2018
7	Lanjutan Jalan Usaha Tani Simpang Rambai – Polindes Jorong Tanjung Ateh	288.000.000,-	2019
8	Dam Jalan Sorik Muaro Jorong Parak Baru	232.000.000,-	2019
9	Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari (hadiah Lomba Tingkat Nasional)	50.000.000,-	2019
10	Drenase Pasar Taram Jorong Balai Cubadak	123.448.000,-	2019
11	Lanjutan Pembangunan Gazebo KAN (Hadiah Lomba Tingkat Provinsi)	20.000.000,-	2019
12	Lanjutan Rabat Beton jalan Depan Mesjid Jami'- Parurangan Jorong Ganting	192.183.000,-	2020

13	Lanjutan Jalan Usaha Tani Gobah Somak Limau – Muaro	136.878.000,-	2020
14	Pembukaan Jalan Usaha Tani Bandar Tunggang Jorong Subarang	136.682.000,-	2020
15	Perbaiki Irigasi Lareh Aie Jorong Tanjung Kubang	94.453.000,-	2020
16	Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari	375.424.830,-	2020
17	Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari	122.006.225,-	2022
18	Lanjutan Jalan Usaha Tani Gobah Somak Limau-Muaro Balai Cubadak	207.524.000,-	2022
19	Rabat Beton Jalan dan Drenase Pasar Taram	135.287.389,45,-	2022
20	Irigasi Piobang Bawah	130.500.000,-	2023
21	Irigasi Bandar Tunggang	160.500.000,-	2023
22	Rehab Irigasi Bandar Junguk	122.483.000,-	2023
23	Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari	133.936.900,-	2023

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Masa Jabatan Pemerintah Nagari Taram 2023. Dikelola oleh peneliti 2023

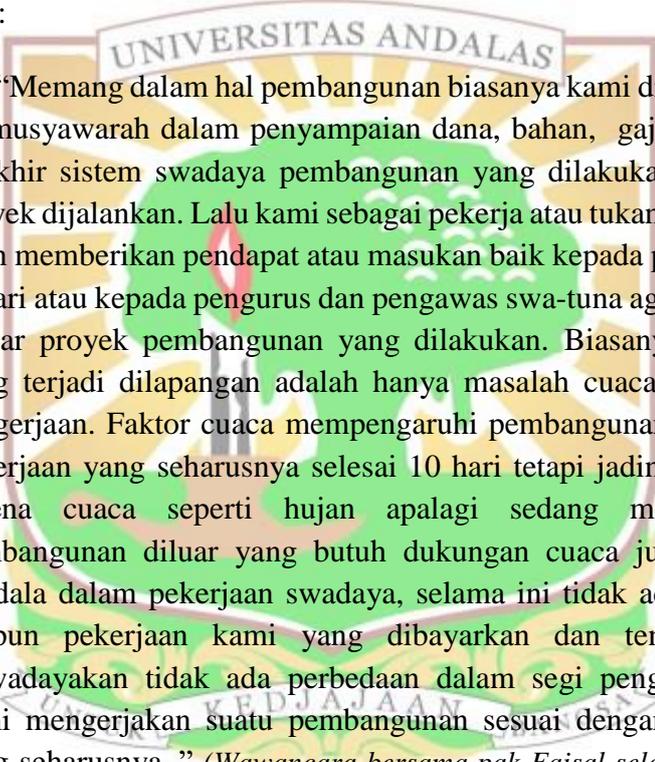
Pada tabel 1.2 dapat dilihat ada beberapa pembangunan infrastruktur yang menggunakan jasa dari inovasi program Swa-Tuna (Swadaya Tukang Nagari). Pembangunan ini lebih mengutamakan terhadap pembangunan infrastruktur yang

bisa secara langsung dimanfaatkan nanti hasilnya oleh masyarakat atau digunakan untuk masyarakat seperti pembangunan kantor walinagari, irigasi, jalan usaha tani, drainase dan lain sebagainya untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan ini didanai melalui dana desa dan melibatkan Swa-Tuna dalam pengerjaannya. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak ada pembangunan dilakukan di nagari taram, walaupun ada didalam tabel itu hanya pembangunan lanjutan sebelumnya. Karena ditahun tersebut negara kita bahkan dunia digemparkan oleh wabah virus covid21, sehingga pada saat itu juga dana desa dialihkan untuk dana pencegahan dan penanganan covid. Berdasarkan kutipan wawancara bersama Ketua Pengurus Swa-Tuna, sebelum adanya program pembangunan di nagari kami ini. Misalnya pembangunan dalam pemugaran kembali kantor wali nagari. Disitu sebelum dimulai proyek pembangunannya, seluruh pengurus dan anggota Swa-Tuna dikumpulkan dan pihak dari pemerintah nagari itu menjelaskan berapa hari target proyek ini selesai, tukang dari jorong mana saja yang bekerja dan bagaimana sistem pengerjaannya untuk swa-tuna, karena untuk pembangunan menggunakan swadaya tukang nagari ini akan digilir sesuai jorong tempat tinggal masing-masing tukang. Setelah itu nanti akan dirincikan mekanisme pembagian pekerjaan yang akan diswadayakan .

Dapat disimpulkan sebelum melakukan proyek pembangunan infrastruktur di Nagari Taram selalu diadakan pertemuan diawal, adanya kegiatan awal sebelum implementasi program ini. Perwakilan perjorong yang tergabung kedalam Swa-Tuna akan menghadiri pertemuan awal bersama pihak Pemerintah Nagari dalam menginformasikan dana serta bagaimana sistem kerja yang akan dilakukan. Mulai

dari dana yang dikeluarkan untuk melakukan proyek ini hingga hitungan gaji tukang dengan satuan HOK (Hari Orang Kerja). Didalam pertemuan ini nantinya akan menghasilkan kesepakatan antara pihak pemerintah nagari dengan pihak Swa-Tuna dan sebagai awal dari adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan Nagari Taram.

Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu anggota Swa-Tuna, sebagai berikut:

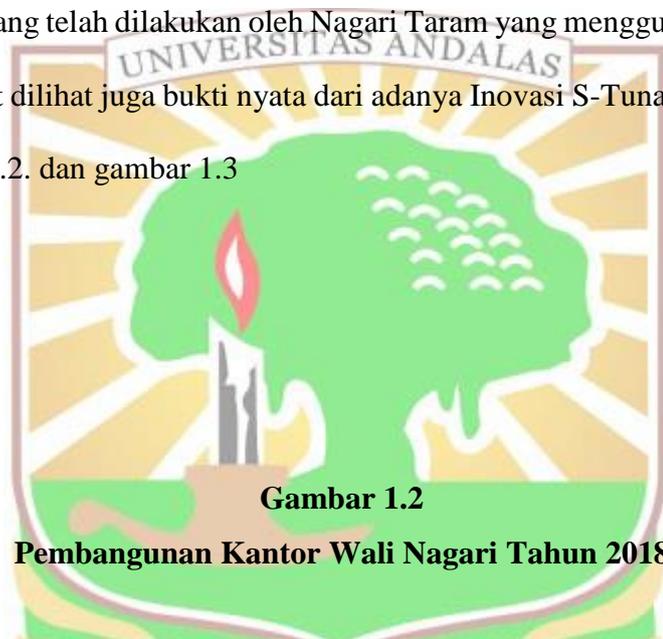


“Memang dalam hal pembangunan biasanya kami diajak untuk bermusyawarah dalam penyampaian dana, bahan, gaji dan yang terakhir sistem swadaya pembangunan yang dilakukan sebelum proyek dijalankan. Lalu kami sebagai pekerja atau tukang biasanya akan memberikan pendapat atau masukan baik kepada pemerintah nagari atau kepada pengurus dan pengawas swa-tuna agar berjalan lancar proyek pembangunan yang dilakukan. Biasanya kendala yang terjadi dilapangan adalah hanya masalah cuaca pada saat pengerjaan. Faktor cuaca mempengaruhi pembangunan misalnya pekerjaan yang seharusnya selesai 10 hari tetapi jadinya 15 hari karena cuaca seperti hujan apalagi sedang mengerjakan pembangunan diluar yang butuh dukungan cuaca juga. Untuk kendala dalam pekerjaan swadaya, selama ini tidak ada kendala apapun pekerjaan kami yang dibayarkan dan tenaga yang diswadayakan tidak ada perbedaan dalam segi pengerjaannya, kami mengerjakan suatu pembangunan sesuai dengan prosedur yang seharusnya..” (Wawancara bersama pak Faisal selaku anggota S-Tuna Rabu, 23 Maret 2022).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan dalam tahap implementasi program Swa-Tuna ini ternyata masih terdapat kendala yang dirasakan oleh tukang nagari, yaitu waktu kerja yang dibutuhkan. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh cuaca dan bentuk kerja yang sedang mereka lakukan, apakah indoor atau outdoor. Sehingga dalam tahap implementasi masih dirasa kurang

sesuai dengan tahap perencanaan di awal karena adanya perubahan dalam waktu. Sehingga dengan adanya permasalahan serta kendala yang ada ini dijadikan sebagai evaluasi dalam pembangunan proyek kedepannya yang akan disampaikan melalui rapat evaluasi serta diskusi lanjutan mengenai program pembangunan kedepannya.

Inovasi Swa-Tuna bertujuan dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada tahap implementasi telah banyak dilakukan pada pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Nagari Taram yang menggunakan dana desa selain itu dapat dilihat juga bukti nyata dari adanya Inovasi S-Tuna ini dapat dilihat pada gambar 1.2. dan gambar 1.3



Gambar 1.2
Pembangunan Kantor Wali Nagari Tahun 2018





Sumber : Dokumentasi Pemerintah Nagari Taram, 2018



Gambar 1.3

Pembangunan Irigasi Piolang Bawah Jorong Tanjung Tahun 2018



Sumber : Dokumentasi Pemerintah Nagari Taram 2018.

Pada gambar 1.2 dan gambar 1.3 dapat dilihat bukti nyata Program S-Tuna berjalan di Nagari Taram, ikutnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur yang berjalan optimal tentu hal ini juga akan berdampak positif bagi Nagari Taram. Beberapa dampak positif yang dihasilkan dengan adanya keberhasilan partisipasi masyarakat melalui inovasi Swa-Tuna dalam pembangunan infrastruktur tentu berdampak positif terhadap pemerintah nagari dalam meraih prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Nagari Taram dapat dilihat pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4

Penghargaan Nagari Taram Nagari Berprestasi



Gambar 1.4 dokumentasi oleh peneliti, 2021.

Pada gambar 1.4 dapat dilihat ada beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Nagari Taram sebagai nagari terbaik tingkat kabupaten. Hal ini juga tidak jauh dari dampak yang dihasilkan dengan adanya inovasi Swa-Tuna yang mendorong cepatnya pembangunan infrastruktur di Nagari Taram sehingga dijadikan sebagai salah satu indikator meningkatnya pembangunan di suatu nagari tersebut. Dan hal ini tentu bermanfaat bagi nagari dalam menunjang dan menambahkan indikator sebagai Nagari Terbaik tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu manfaat yang dirasakan langsung oleh swadaya tukang nagari yaitu hasil dari pembangunan

yang dilakukan oleh Swa-Tuna dapat langsung dimanfaatkan oleh mereka sendiri seperti jalan tani yang ada di Nagari Taram dalam memudahkan jalur transportasi masyarakat, adanya drainase dan irigasi dalam menunjang hasil pertanian masyarakat. Selain itu adanya manfaat bagi pribadi anggota yang tergabung dalam kegiatan Swa-Tuna ini yaitu lepasnya dari tanggung jawab gotong royong dan bebas dari Ronda.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melihat bagaimana tahap partisipasi masyarakat terutama pada program S-Tuna dalam perspektif partisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Nagari Taram. Hal ini dikarenakan nagari taram berhasil menjalankan program Swa-Tuna (Swadaya Tukang Nagari) mulai dari tahap perencanaan hingga terbitnya SK kepengurusan, tahap pelaksanaan, serta tahap dalam penerimaan manfaat dan tahap evaluasi program Swa-Tuna di Nagari Taram.

